PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Ahmad Yani Nomor 29 Amlapura, Karangasem, Bali
Telp / Fax ( 0363 ) 21170
Laman : http://dpmd.karangasemkab.go.id,
Email : dpmdkarangasem@gmail.com

Buda Umanis Julungwangi, 3 Juni 2026

Kepada :
Yth. 1. Camat se-Kabupaten Karangasem
2. Perbekel se-Kabupaten Karangasem

di-
Tempat

SURAT PENGANTAR
Nomor : 100.3.2.4/904/Adpemdes/DPMD

| NO | JENIS SURAT YANG DI KIRIM | BANYAKNYA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Dikirim Peraturan Bupati Karangasem Nomor 9 Tahun 2026 tentang Transaksi Non Tunai Desa. | 1 (gabung) | Dikirim dengan hormat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya. |

Ditandatangani secara elektronik oleh:
**Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem**

**I Made Agus Budiyasa, ST.,MT**
Pembina Utama Muda
NIP. 19730815 199903 1 013

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bupati dan Wakil Bupati Karangasem
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:
https://esurat.karangasemkab.go.id/files/tte/tnde_surat_keluar_sign/tte-53406_conv.pdf



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

TRANSAKSI NON TUNAI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang sangat berperan penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif;

b. bahwa pengelolaan keuangan desa yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, diperlukan sistem pembayaran atau transaksi yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, perlu pengaturan secara komprehensif;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transaksi Non Tunai Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 7169);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
14. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2025 Nomor 22);

15. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem.
6. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
10. Bendahara Desa adalah perangkat Desa yang melaksanakan fungsi kebendaharaan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
14. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan *Cash Management System* (*CMS*) atau aplikasi perbankan yang sejenis.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
17. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke RKD.
18. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari RKD.
19. Pendapatan adalah semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
20. Belanja Desa adalah semua Pengeluaran Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa .
21. Pembiayaan Desa adalah semua Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
22. Belanja Desa adalah semua Pengeluaran Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
23. Penyedia Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/jasa.

24. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk secara resmi oleh Bupati.
25. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pengelolaan APB Desa di Daerah.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:
    a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa;
    b. meningkatkan efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa ;
    c. kemudahan akses dan inklusi keuangan;
    d. pengurangan risiko keamanan; dan
    e. untuk mempercepat implementasi sistem Pemerintahan berbasis elektronik.

BAB II

SISTEM DAN PROSEDUR TRANSAKSI NON TUNAI DESA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Desa

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APB Desa dilaksanakan berdasarkan asas:
    a. efektif dan efisien;
    b. keamanan;
    c. manfaat; dan
    d. akuntabel.
(2) Asas efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berorientasi pada ketepatan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya secara proporsional.
(3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jaminan atas keamanan pada semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Transaski Non Tunai.

(4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan manfaat bagi kepentingan Desa dan semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai.

(5) Asas akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Transaksi Non Tunai dalam pengelolaan APB Desa meliputi seluruh Penerimaan Desa dan Pengeluaran Desa.

(2) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui RKD.

Bagian Kedua

Sistem Prosedur Penerimaan Desa

Pasal 5

(1) Penerimaan Desa dalam APB Desa yang dilaksanakan melalui Transaksi Non Tunai meliputi:

a. Pendapatan Desa yang meliputi:

1. pendapatan asli Desa terdiri dari:
   a) hasil usaha Desa;
   b) hasil aset;
   c) swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
   d) Pendapatan asli Desa lain.
2. Pendapatan transfer terdiri dari:
   a) dana Desa;
   b) alokasi dana Desa;
   c) bagian dari hasil pajak dan retribusi;
   d) bantuan keuangan Daerah; dan
   e) bantuan keuangan provinsi Bali.
3. Pendapatan lain Desa yang sah terdiri dari:
   a) penerimaan dari kerjasama Desa;
   b) bantuan perusahaan;
   c) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;

d) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya;
e) bunga bank; dan
f) pendapatan lain-lain.

b. penerimaan pembiayaan yang meliputi:
1. sisa lebih perhitungan anggaran; dan
2. pencairan dana cadangan.

(2) Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung ke RKD.

Bagian Ketiga

Sistem Prosedur Pengeluaran Desa

Pasal 6

(1) Pengeluaran Desa dalam APB Desa dilaksanakan melalui mekanisme Transaksi Non Tunai yang meliputi:
a. belanja Desa yang terdiri dari:
1. belanja pegawai;
2. belanja barang/jasa;
3. belanja modal; dan
4. belanja tak terduga.
b. pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari:
1. penyertaan modal Desa; dan
2. pembentukan dana cadangan.

(2) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKD.

Bagian Keempat

Pengecualian Transaksi Non Tunai Desa

Pasal 7

(1) Dalam kondisi tertentu, Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan secara tunai untuk transaksi dengan nilai paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per transaksi.

(2) Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan secara tunai untuk transaksi dengan nilai paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per transaksi.

(3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
   a. keterbatasan akses layanan perbankan;
   b. gangguan sistem Transaksi Non Tunai;
   c. kebutuhan mendesak; dan/atau
   d. kondisi lain yang ditetapkan oleh Bupati.

(4) Pengeluaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi:
   a. belanja *transport*/uang saku peserta kegiatan/ masyarakat;
   b. upah kerja tukang/tenaga kerja;
   c. belanja bahan bakar minyak/pelumas;
   d. belanja benda pos;
   e. belanja pajak kendaraan bermotor; dan/atau
   f. pengeluaran untuk keperluan penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana alam dan/atau non alam.

(5) Pelaksanaan transaksi secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus:
   a. dicatat secara tertib;
   b. didukung bukti yang sah; dan
   c. dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Dalam hal pembayaran akan dilaksanakan secara tunai, penarikan tunai harus disimpan dalam brankas Desa.

(2) Pengeluaran uang tunai dari brankas Desa besarannya berdasarkan SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan kepada kepala urusan keuangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pengeluaran uang tunai dari brankas oleh kepala urusan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 10

(1) Dalam implementasi Transaksi Non Tunai untuk pengelolaan APB Desa, kepala urusan keuangan selaku Bendahara Desa diluar kewenangan dilarang:
   a. melakukan pembayaran melebihi batas nilai rupiah atau melanggar jenis belanja yang harus dilakukan secara non tunai tanpa alasan yang dapat dibenarkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
   b. melakukan pengelolaan APB Desa dalam rekening atas nama pribadi;
   c. melakukan penarikan dana tunai di Bank Persepsi;
   d. menyimpan uang tunai diluar brankas Desa; dan
   e. secara lalai ataupun dengan sengaja tidak melakukan pengamanan dan menerapkan prinsip kehati-hatian yang menyebabkan terjadinya kejahatan perbankan digital.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

FASILITASI PENERAPAN KEBIJAKAN TRANSAKSI NON TUNAI DESA

Pasal 11

(1) Pemerintah Desa menerapkan kebijakan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Bank Persepsi.
(2) Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembayaran atas pelaksanaan APB Desa melalui sistem Transaksi Non Tunai, maka:
   a. *Perbekel*, perangkat Desa dan BPD harus memiliki rekening pada Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Bupati; dan
   b. penyedia barang/jasa atau pihak ketiga harus memiliki rekening pada Bank Persepsi.

(3) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempunyai jaringan sistem keuangan/perbankan yang terkoneksi dengan aplikasi milik kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

(4) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau pihak ketiga tidak memiliki rekening pada Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, biaya administrasi transaksi dibebankan kepada Penyedia Barang/Jasa atau pihak ketiga.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait memfasilitasi penerapan kebijakan Transaksi Non Tunai Desa dengan menyediakan sarana prasarana pendukung.

(2) Penyediaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
   a. pengadaan, peningkatan, dan perawatan perangkat *server*;
   b. pengadaan peningkatan perawatan jaringan internet *server*; dan
   c. sarana prasarana pendukung lainnya.

(3) Penyediaan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 13

(1) *Perbekel* melakukan koordinasi kepada Bank Persepsi untuk pelaksanaan Transaksi Non Tunai Desa.

(2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan *Perbekel* secara tertulis kepada ketua BPD untuk diketahui.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Pembinaan pelaksanaan Transaksi Non Tunai Desa dilakukan oleh DPMD dan Diskominfo serta Perangkat Daerah terkait.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Transaksi Non Tunai, bersama dengan Bank Persepsi.

(3) Dalam mendukung pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Persepsi menyiapkan sarana dan prasarana fasilitas perbankan di wilayah kecamatan dalam mempercepat pelaksanaan Transaksi Non Tunai Desa.

(4) Dalam pembinaan pelaksanaan Transaksi Non Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Pengawasan pelaksanaan Transaksi Non Tunai Desa pada Pemerintahan Desa dilakukan oleh Bupati melalui Camat dan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dalam hal terjadi gangguan sistem operasional jaringan maupun sarana prasarana pada Transaksi Non Tunai maka transaksi dilakukan secara tunai.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 4 Mei 2026

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI PUTU PARWATA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 4 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2026 NOMOR 9